Meneropong Kelanjutan Pilkada Serentak di Tengah Pandemi

Rilis Hasil Analisis Big Data
Yogyakarta, 13 Oktober 2020

Tim Peneliti:

Mada Sukmajati
Wegik Prasetyo
Yonatan HL Lopo
Warih Aji Pamungkas
Vendi Ardianto

LABORATORIUM BIGDATA ANALYTICS
DPP Departemen Politik & Pemerintahan Fisipol UGM
PolGov RESEARCH CENTRE FOR POLITICS AND GOVERNMENT Department of Politics & Government - FISIPOL UGM

Tim Peneliti

- Mada Sukmajati
- Wegik Prasetyo
- Yonathan HL Lopo
- Warih Aji Pamungkas
- Vendi Ardianto
- Miftah Farid

Pendahuluan

- Pelaksanaan Pilkada 2020 menghadapi tantangan baru dibandingkan pelaksanaan sebelumnya, yakni pandemi covid-19.
- Pandemi covid-19 yang melanda semua negara → beberapa negara menunda pemilu nasional dan lokal, beberapa negara lain tetap menyelenggarakan pemilu nasional dan lokal
- Sampai dengan saat ini belum ada upaya serius untuk membuat pemetaan berbasis data empiris tentang wacana penundaan Pilkada serentak 2020, yang berbasis pada Aktor, institusi dan isu-isu kunci
- Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 → 270 daerah (8 Pilgub, 224 kabupaten, dan 37 kota di 32 provinsi)
- Terjadi kontroversi terkait dengan isu pelaksanaan Pilkada 2020
  - Pihak pemerintah → Pilkada 2020 ditunda dari tgl 23 September 2020 ke tgl 9 Desember 2020
  - Kontra → Pilkada 2020 perlu ditunda sampai pandemic Covid-19 mereda (tidak ada tanggal)
- Rumusan Masalah
  - Bagaimana wacana penundaan Pilkada Serentak 2020 dari sudut pandang aktor dan isu kunci?
  - Bagaimana respon warganet terkait wacana penundaan Pilkada Serentak?

Metodologi

Penelitian ini menggunakan dua dataset, yakni:

1. Pemberitaan di media online dengan topik penundaan pilkada;
    - Dataset ini diambil dari tgl 1 Maret – 30 September 2020;
    - Kata kunci yang digunakan: tunda pilkada, penundaan pilkada, menunda pilkada, tunda pemilu, penundaan pemilu, menunda pemilu
2. Perbincangan di media sosial twitter dengan topik penundaan pilkada;
    - Dataset ini diambil dari tgl 1 Maret – 30 September 2020;
    - Kata kunci yang digunakan: tunda pilkada, penundaan pilkada, menunda pilkada, tunda pemilu, penundaan pemilu, menunda pemilu

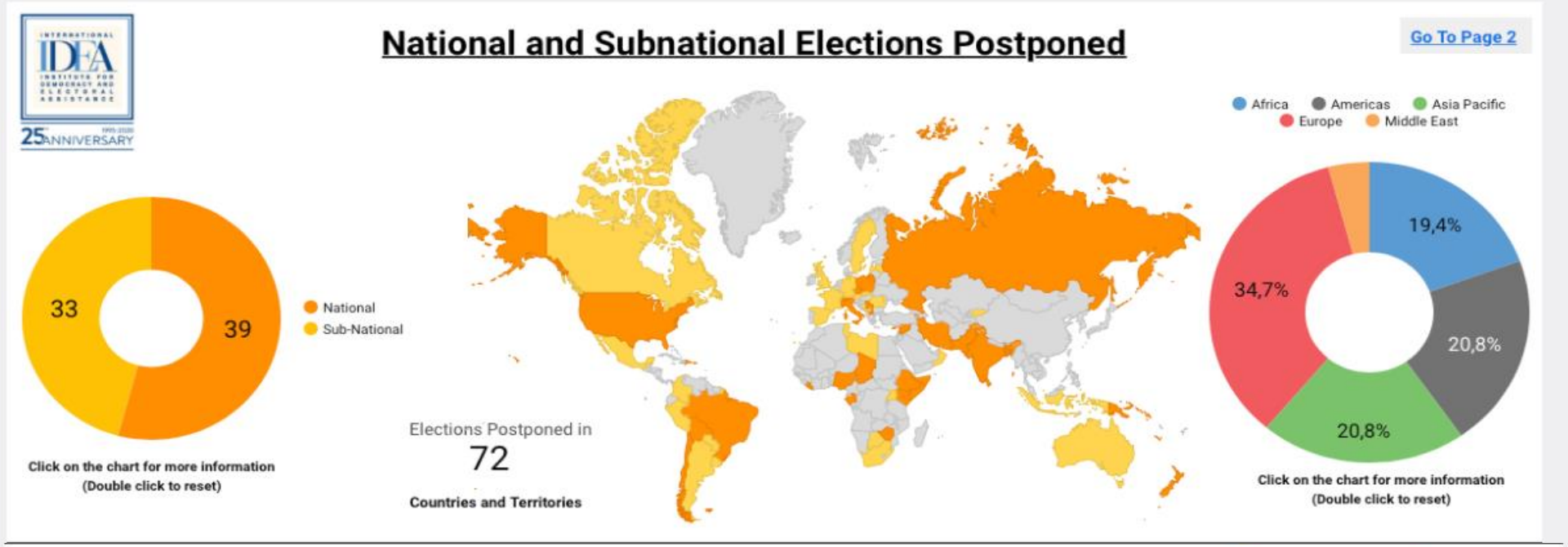

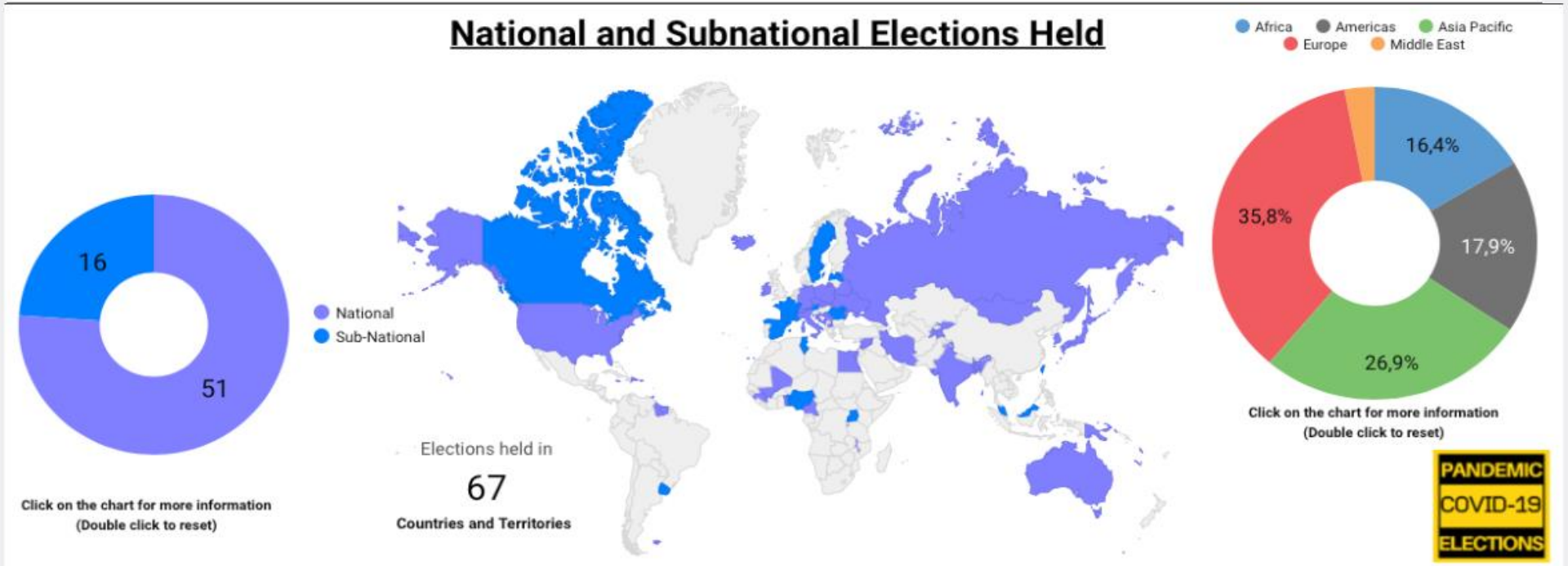

Rentang Waktu
21 Februari – 4 Oktober 2020

Sumber: ***https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections***

Pemberitaan Media Online tentang Penundaan Pilkada 2020

Perkembangan Kasus COVID-19 Harian di 32 Provinsi Penyelenggara Pilkada 2020

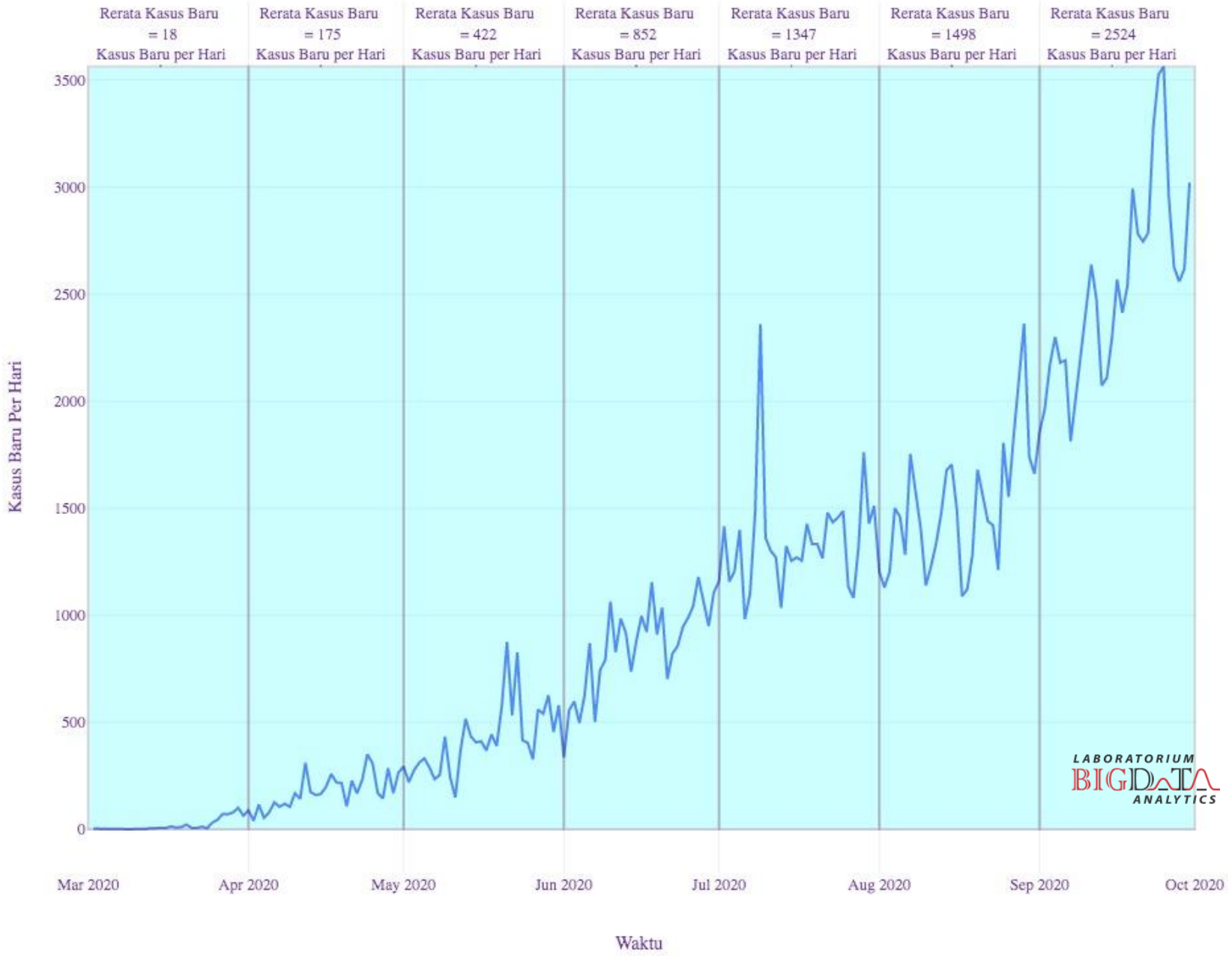

sumber : www.covid19.go.id

Jumlah Artikel Berdasarkan Hari/Bulan

Dataset 2: Penundaan Pilkada

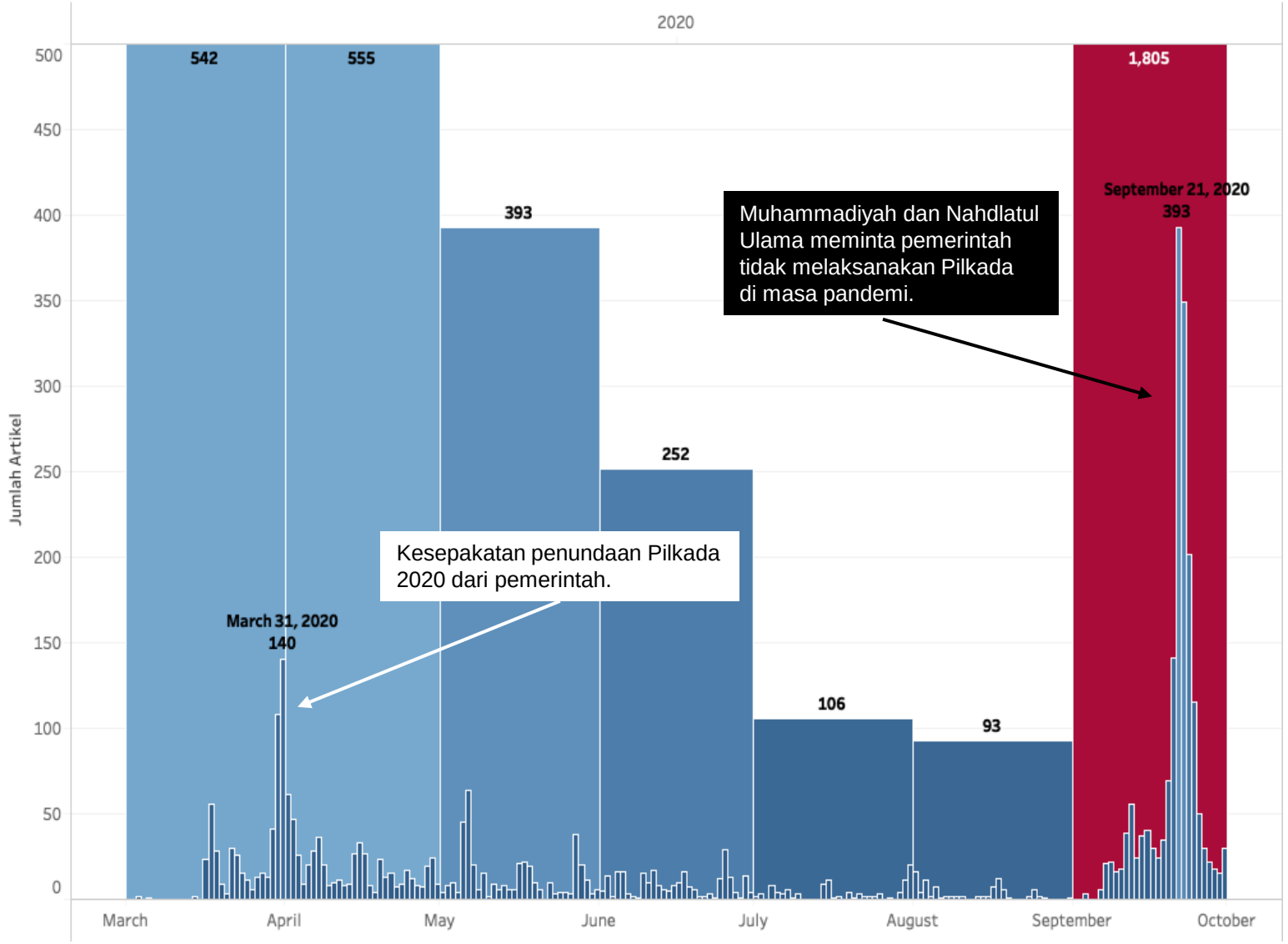

- Terdapat 3.746 artikel dari 155 portal media yang memberitakan tentang topik penundaan pilkada dari rentang waktu Bulan Maret sampai Bulan September 2020.
- Pemberitaan terbanyak muncul pada 31 Maret 2020 dan 21 September 2020
- Puncak pertama terjadi paska ditetapkannya Perppu No. Tahun 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020
- Puncak kedua terjadi paska NU (20 September 2020) dan Muhammadiyah (21 September 2020) mengeluarkan pernyataan resmi agar pemerintah mempertimbangkan utk menunda pelaksanaan Pilkada 2020

Persentase Artikel Berdasarkan Portal Media

Dataset 2: Penundaan Pilkada

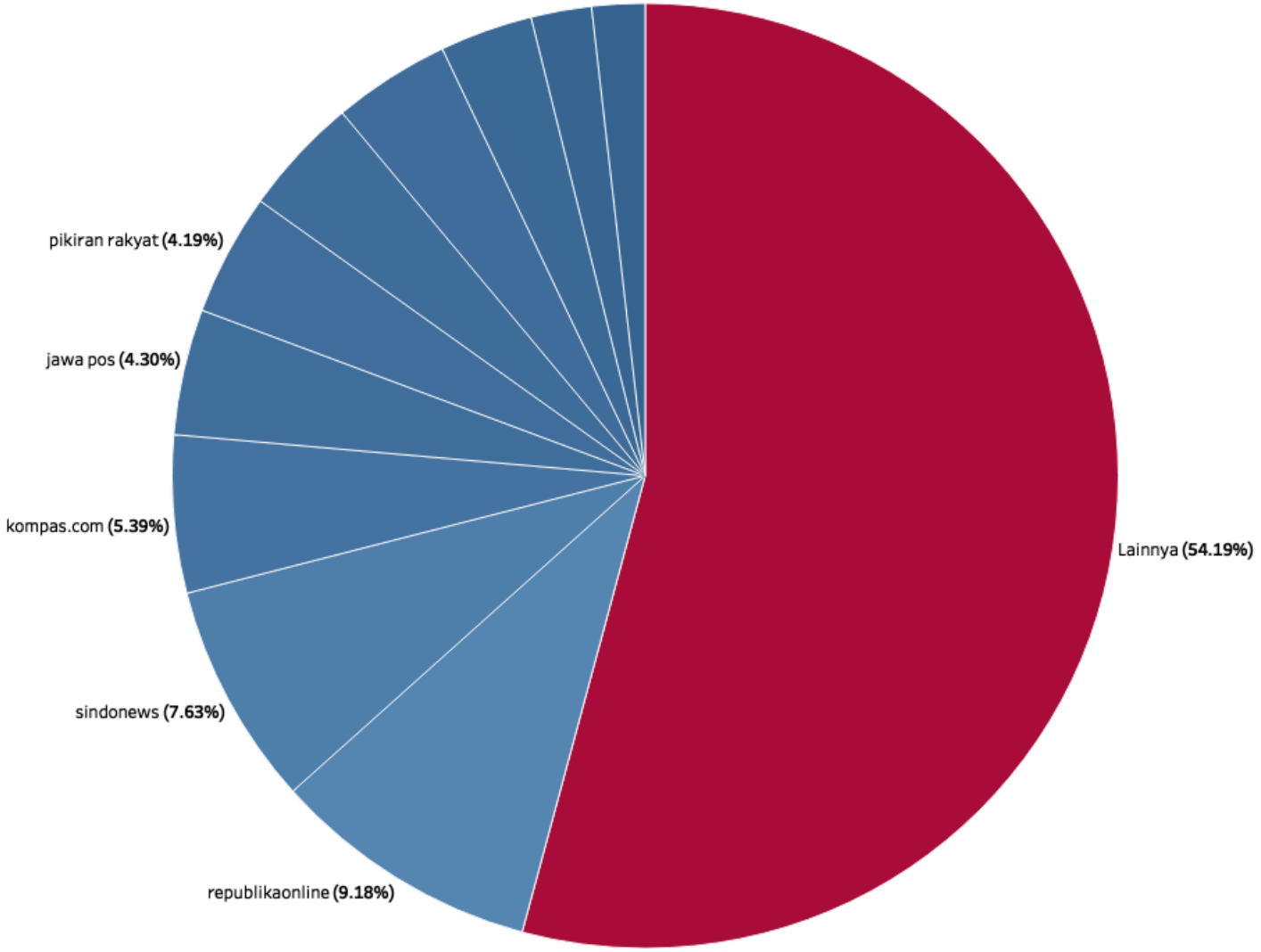

- Persebaran pemberitaan media online terkait topik penundaan Pilkada 2020 cukup merata → tidak ada yang melebihi 10%
- Tiga besar portal media yg memberitakan penundaan Pilkada 2020: republikaonline (9,18%), sindonews (7,63%), dan kompas.com (5,39%) → meski selisih jumlah tidak banyak dengan media lain
- Data ini menunjukkan bhw isu penundaan Pikada 2020 telah menjadi materi pemberitaan dari semua media

Analisis Jaringan Kata

Dataset 2: Penundaan Pilkada

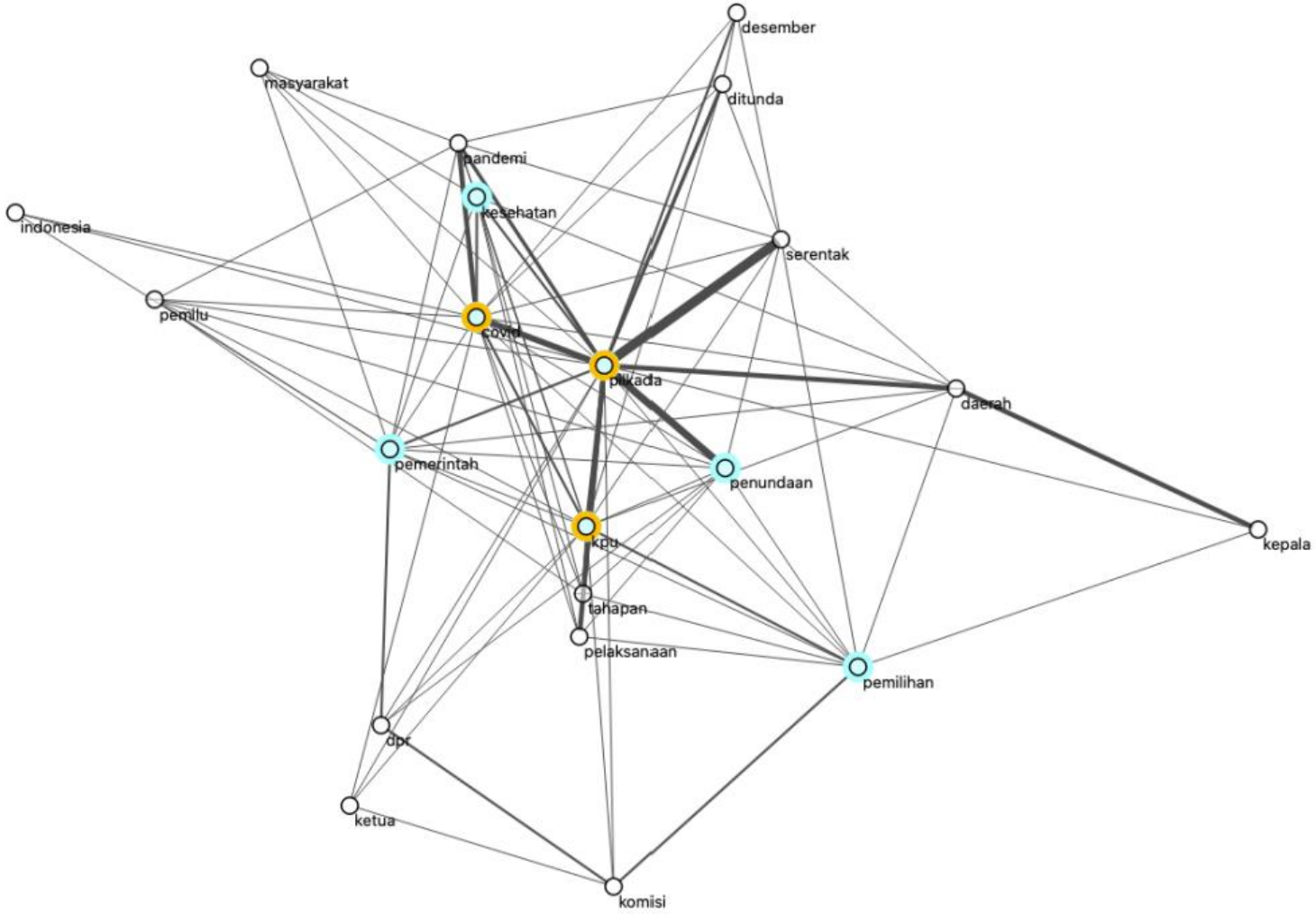

- Setiap actor maupun informasi dalam jaringan kata saling terhubung satu sama lain
- Pemberitaan tentang penundaan Pilkada 2020 paling dikaitkan oleh dua hal utama yakni, KPU (sebagai penyelenggara pemilu) dan Covid-19 (menjadi konteks pelaksanaan pilkada)
- Covid-19 menjadi perhatian serius terkait dengan aspek kesehatan masyarakat
- KPU sering dikaitkan dengan kesiapan tahapan pelaksanaan Pilkada 2020
- Setelah itu, baru kemudian pemerintah yg sering dikaitkan dengan topik penundaan Pilkada 2020

Konsep (Wiki) Terbanyak Dibahas

Dataset 2: Penundaan Pilkada

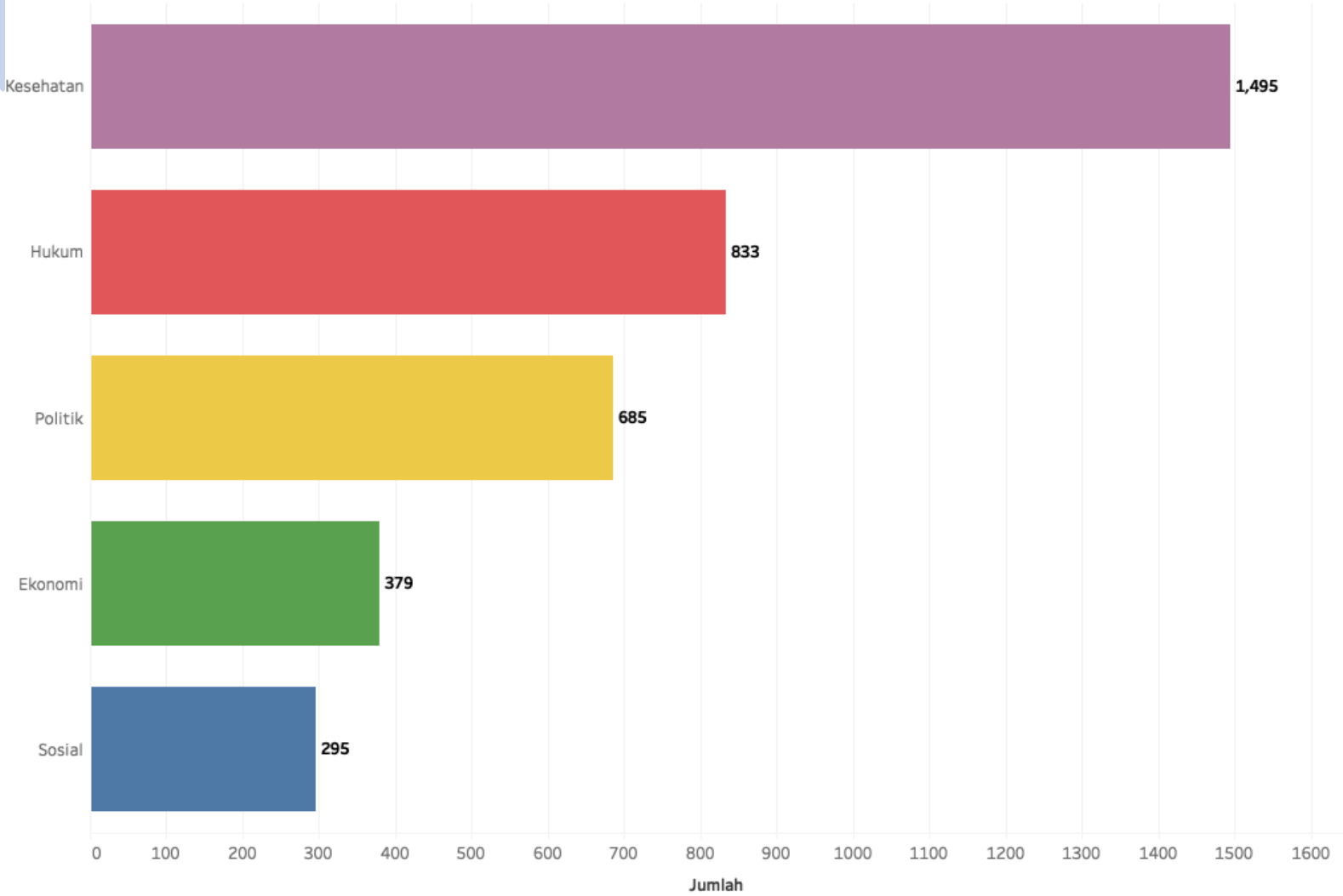

- Pemberitaan tentang penundaan pilkada paling banyak dikaitkan dengan isu kesehatan yang kemudian disusul isu hukum, politik, ekonomi, dan sosial
- Hal ini munjukan bahwa isu kesehatan merupakan isu yang paling banyak mendapat perhatian terkait pilkada di tengah pandemic
- Di Perppu No. 2 Tahun 2020 disebutkan bhw pertimbangan utk menyelenggarakan Pilkada di 9 Desember 2020 adalah karena pertimbangan kesehatan dan stabilitas politik dalam negeri

Konsep (Tokoh) Terbanyak Dibahas

Dataset 2: Penundaan Pilkada

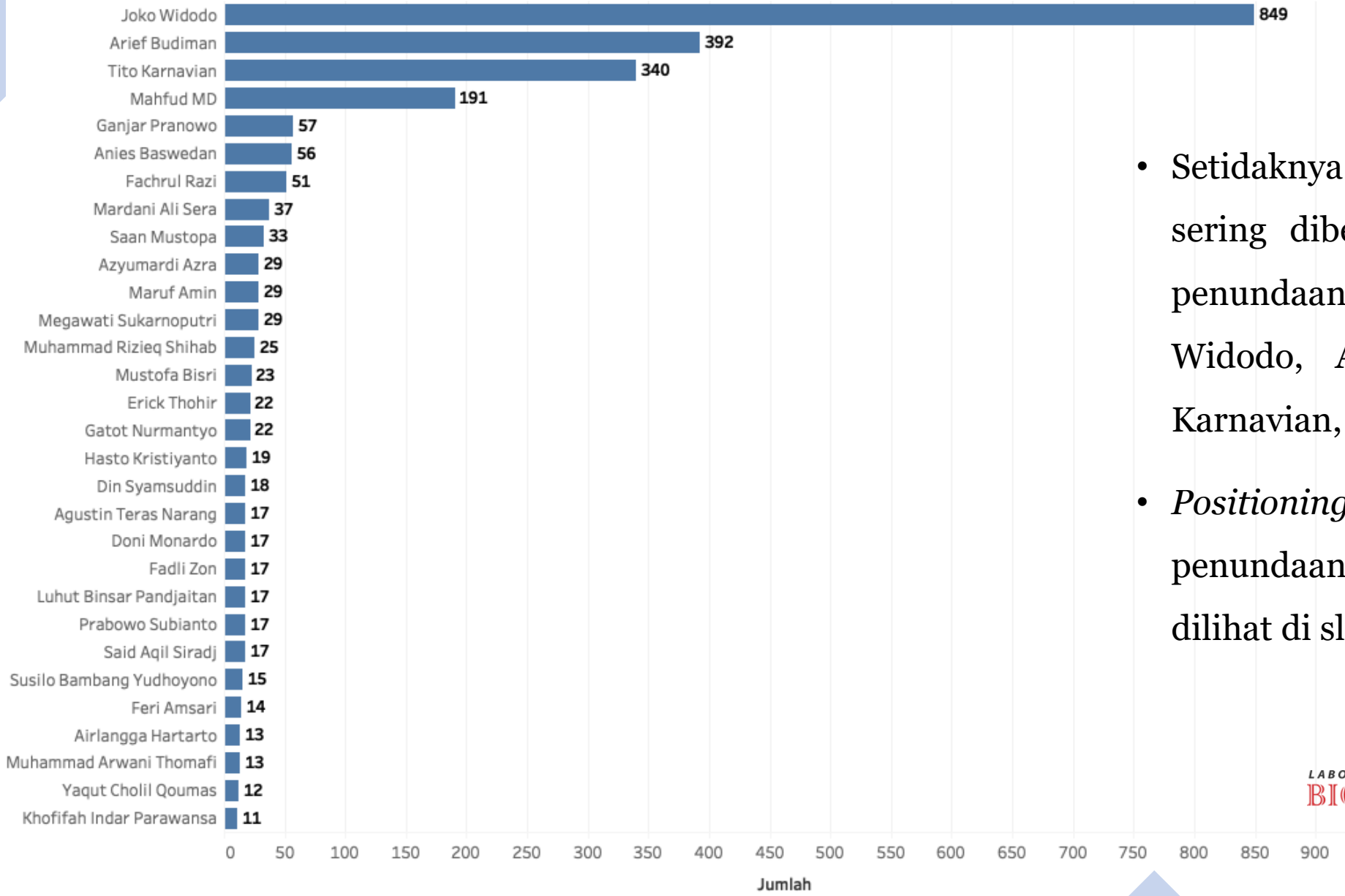

- Setidaknya ada empat actor yang sering diberitakan dalam topik penundaan pilkada yakni Joko Widodo, Arief Budiman, Tito Karnavian, dan Mahfud MD.
- *Positioning* setiap actor terhadap penundaan pilkada 2020 dapat dilihat di slide berikutnya:

Artikel yang Membahas Joko Widodo

Analisis Teks

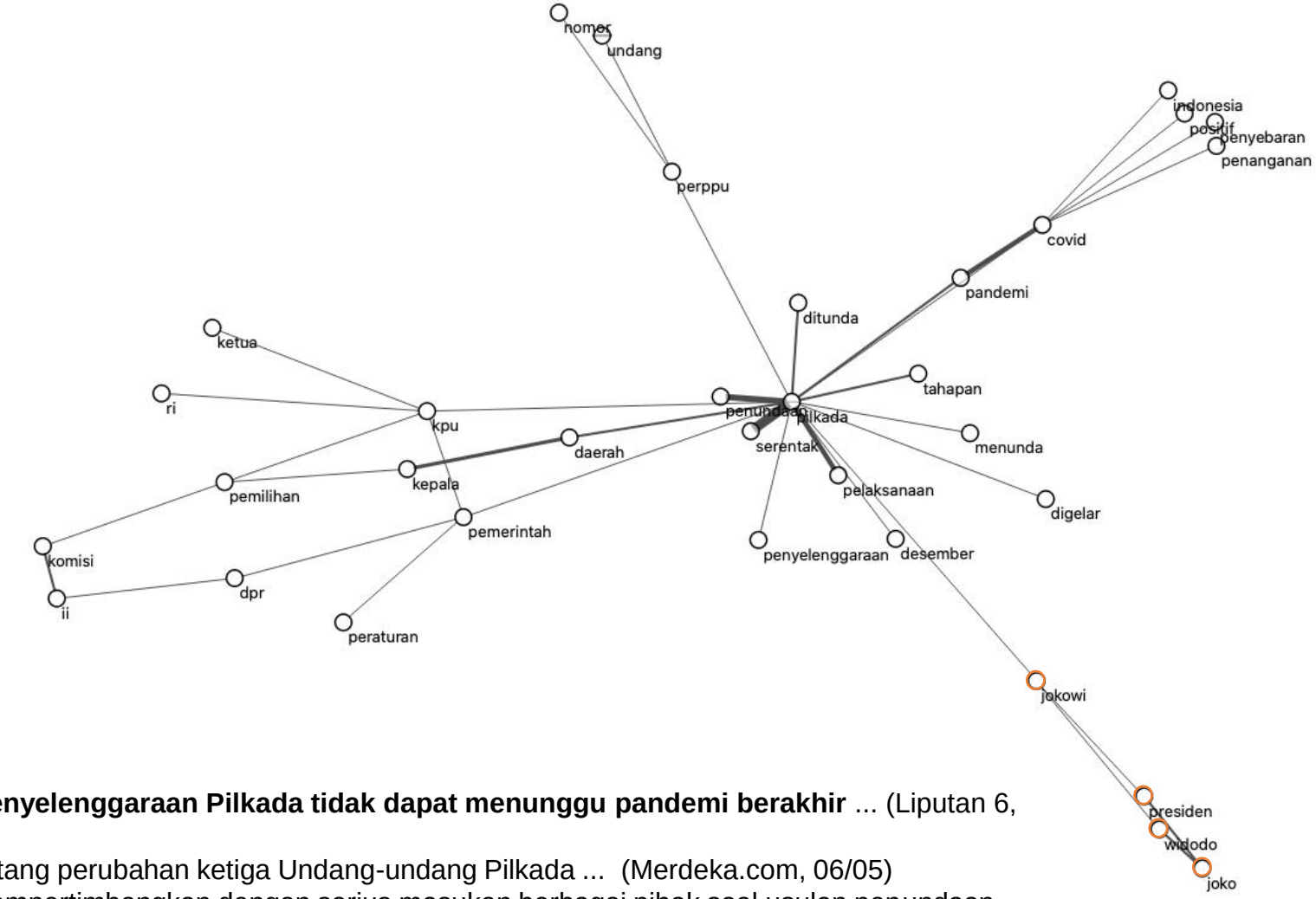

Konteks kalimat:

- ... Fadjroel menambahkan, **Presiden Jokowi menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak dapat menunggu pandemi berakhir** ... (Liputan 6, 25/09)
- ... Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Perppu tentang perubahan ketiga Undang-undang Pilkada ... (Merdeka.com, 06/05)
- ... Luqman Hakim yakin Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertimbangkan dengan serius masukan berbagai pihak soal usulan penundaan Pilkada ... (Liputan 6, 22/09)

Artikel yang Membahas Arief Budiman

Analisis Teks

Konteks kalimat:

- ... Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), **Arief Budiman menyebutkan bahwa penerapan protokol kesehatan akan dilakukan secara ketat** ... (Pikiran Rakyat, 05/07)
- ... dalam sebuah diskusi yang digelar Minggu (19/4/2020). Arief mengatakan, pihaknya minta diberi kewenangan menunda Pilkada melalui Perppu ... (Kompas, 20/04)
- ... saat ini setidaknya sudah dua komisioner KPU, yakni Arief Budiman dan Pramono Ubaid Tantowi, terkonfirmasi positif COVID-19 ... (Kompas, 21/09)

Artikel yang Membahas Tito Karnavian

Analisis Teks

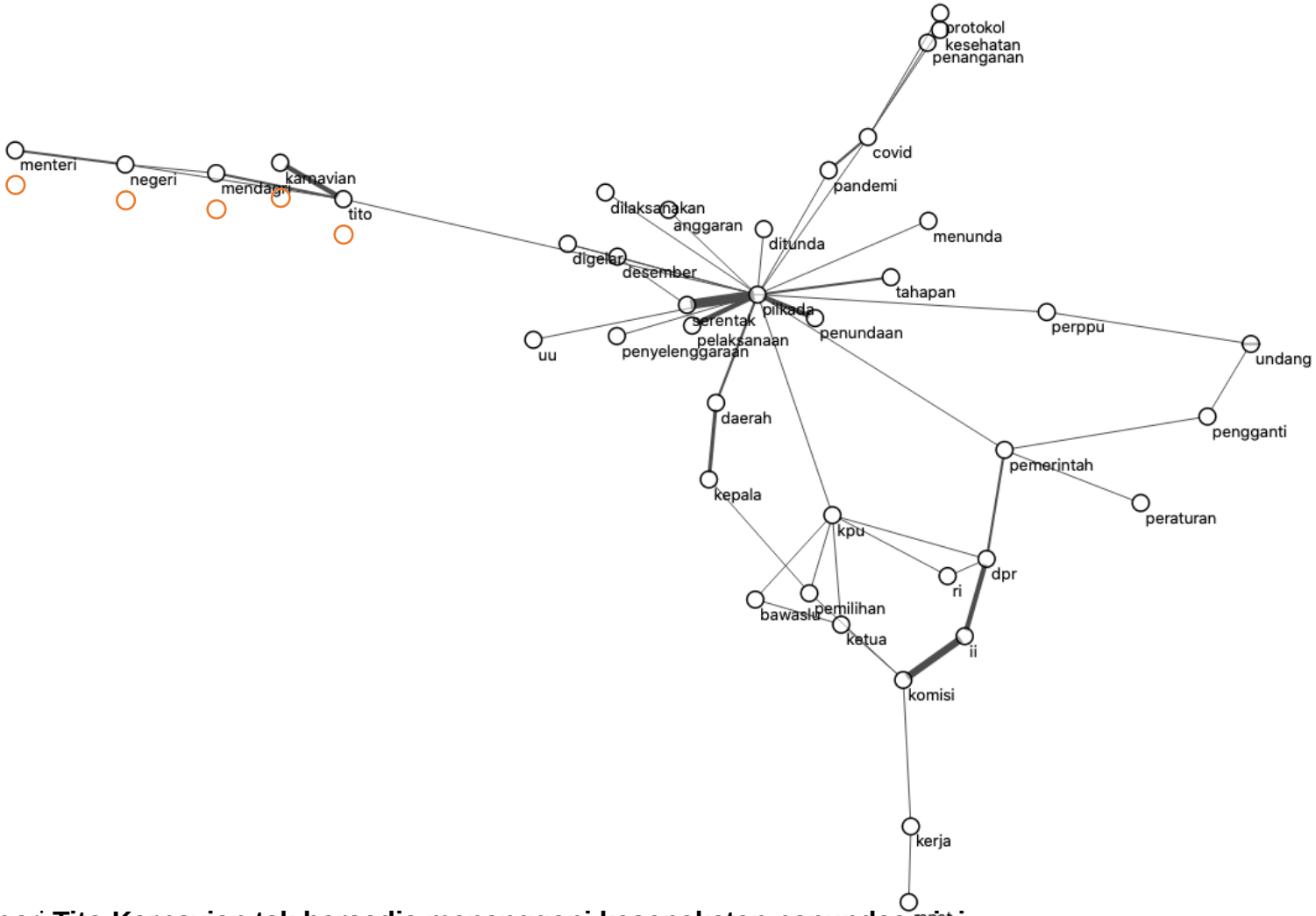

Konteks kalimat:

- ... menanggulangi virus Corona di wilayahnya. Menteri Dalam Negeri **Tito Karnavian tak bersedia menanggapi kesepakatan penundaan ini** ... (Tempo, 31/03)
- ... Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, hajatan Pilkada serentak itu kecil kemungkinan bisa digelar pada September 2020 ini (14/4).
- ... merespons itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) **Tito Karnavian mengaku tidak mungkin melakukan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020** ... (Indopos, 22/09)

Artikel yang Membahas Mahfud M.D.

Analisis Teks

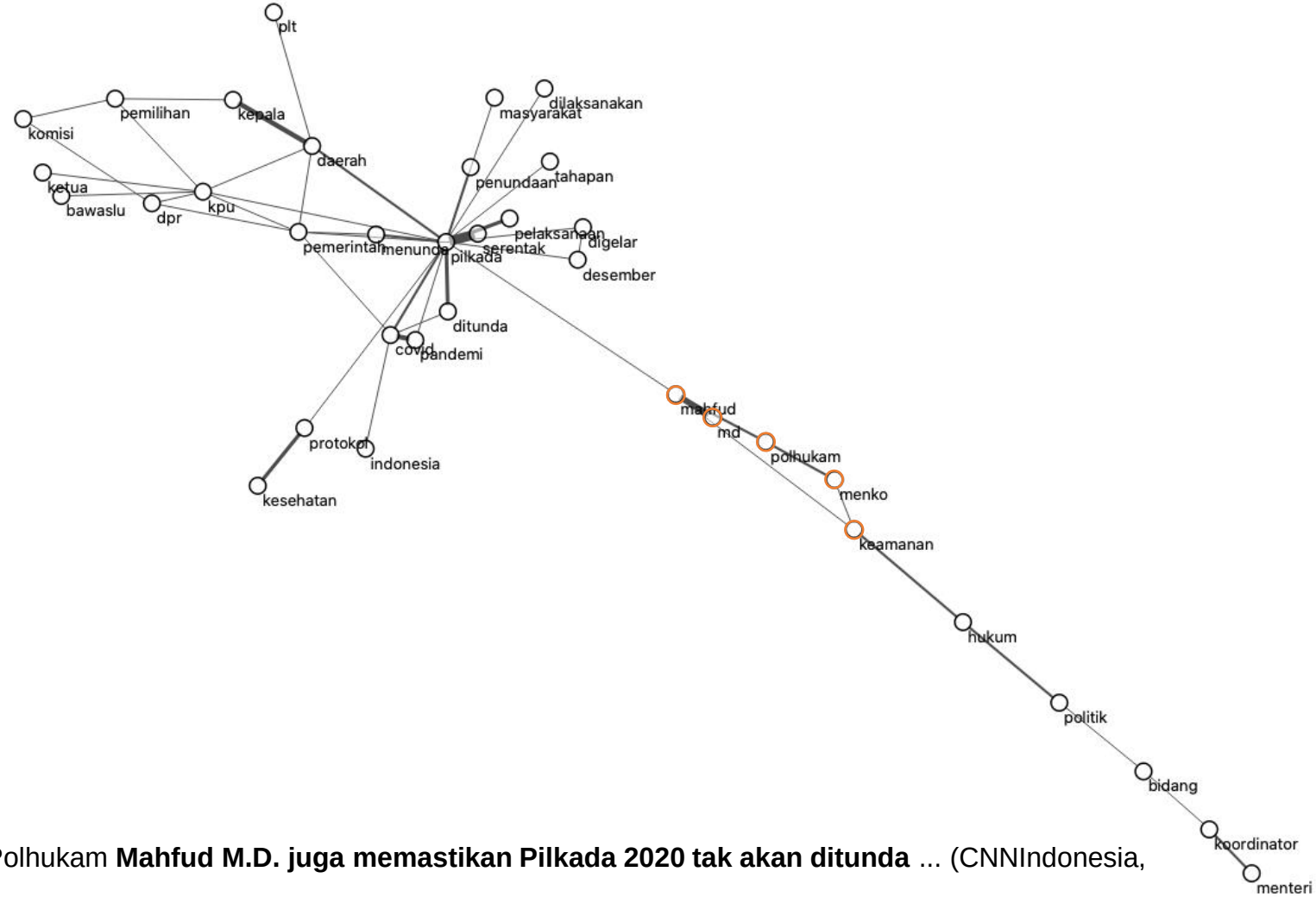

Konteks kalimat:

- ... Pilkada tetap digelar demi hak konstitusional rakyat. Menko Polhukam **Mahfud M.D. juga memastikan Pilkada 2020 tak akan ditunda** ... (CNNIndonesia, 22/09)
- ... penegakan disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum yang tegas. Mahfud memaklumi adanya masyarakat yang menginginkan Pilkada ditunda, namun ada ... (JPNN.com, 23/09)
- ... Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) **Mahfud M.D. menolak penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah** ... (Merdeka.com, 24/09)

Konsep (Instansi) Terbanyak Dibahas

Dataset 2: Penundaan Pilkada

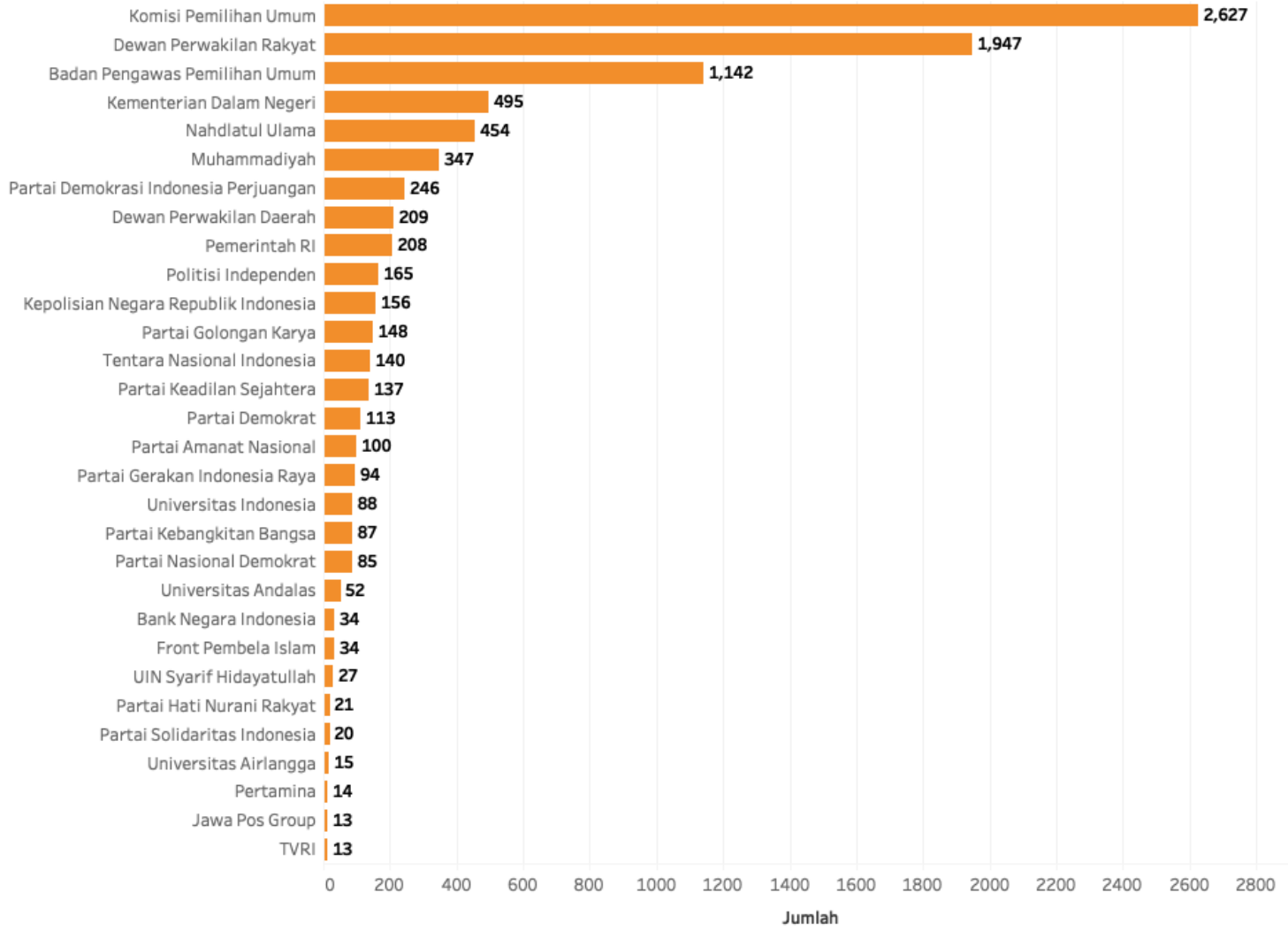

- Setidaknya ada enam instansi/organisasi yang sering diberitakan dalam topik penundaan pilkada yakni KPU, DPR, Bawaslu, Kemendagri, NU, dan Muhammadiyah.
- *Positioning* setiap instansi/organisasi terhadap penundaan pilkada 2020 dapat dilihat di slide berikutnya:

Artikel yang Membahas PP Muhammadiyah

Analisis Teks

Konteks kalimat:

- ... **penundaan pilkada juga datang dari sejumlah organisasi masyarakat. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tegas menyuarakan hal tersebut** ... (Liputan6, 22/09)
- ... dua organisasi keagamaan besar Indonesia, yakni PBNU dan Muhammadiyah secara tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada serentak ... (Pikiran Rakyat, 23/09)
- ... di tanah air, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kompak meminta penundaan pelaksanaan pilkada 2020 ... (Liputan6, 25/09)

Artikel yang Membahas PB Nahdlatul Ulama

Analisis Teks

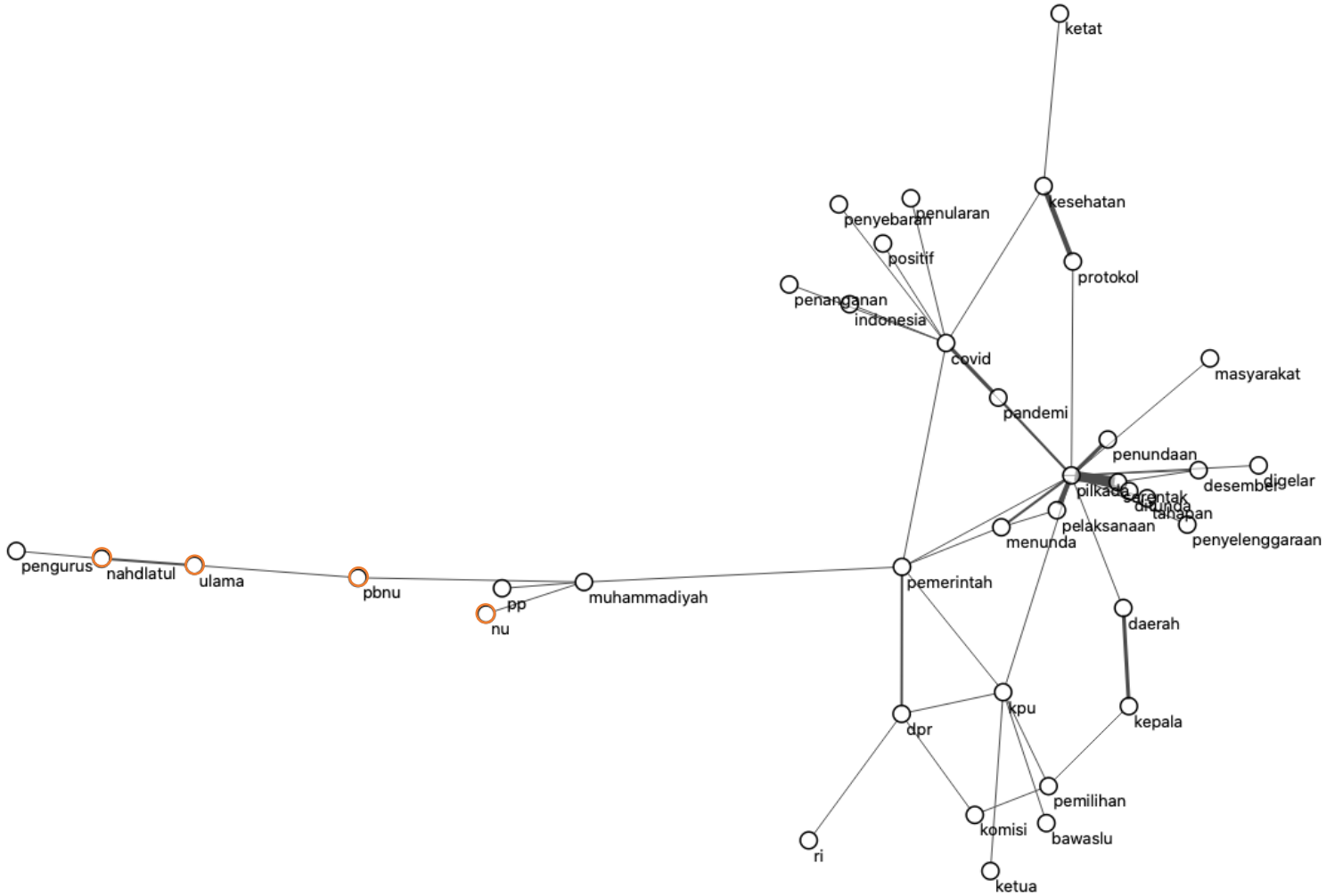

Konteks kalimat:

- ... **perlindungan terhadap kelangsungan hidup masyarakat menjadi pertimbangan PBNU** mengusulkan penundaan penyelenggaraan pilkada 2020 ... (Kompas, 21/09)
- ... satu pihak yang meminta pilkada ditunda adalah pengurus besar **Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menilai penyelenggaraan pilkada memiliki banyak mudarat** ... (Pikiran Rakyat, 22/09)
- ... **poin penting yakni hifdzhunnafs atau menjaga keselamatan jiwa. Bagi NU, menyelamatkan nyawa manusia adalah harus diutamakan dalam mengambil kebijakan** ... (Suara Merdeka, 24/09)

Perbincangan Media Sosial Twitter tentang Penundaan Pilkada 2020

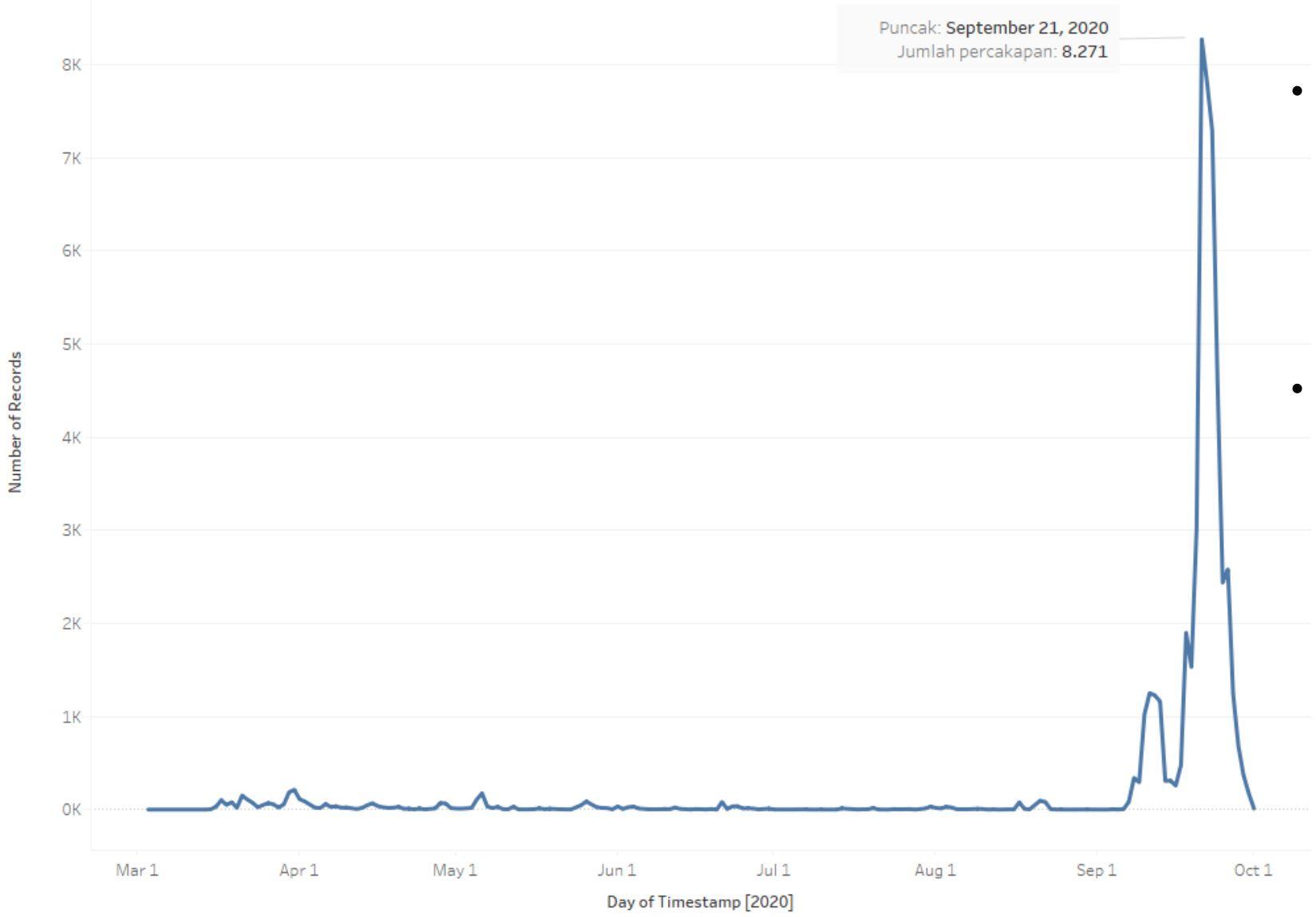

- Terdapat 52.734 twit tentang topik penundaan pilkada dari rentang waktu Bulan Maret hingga Bulan Oktober 2020
- Puncak dari twit tentang topik penundaan pilkada terjadi pada 21 September 2020 dengan 8.271 twit → pasca pernyataan resmi yg dikeluarkan oleh NU dan Muhammadiyah

Hashtags	Freq
#tundapilkada	1.518
#kumparannews	1.273
#pilkadaataupembunuhan	264
#temponasional	198
#tundapilkadaserentak	167
#pilkada2020	140
#tundapilkadaserentak20..	129
#diktatorkonstitusional	96
#stoppilkadamaut	86
#pilkada	81
#pilkadabencanaserentak	79
#covid19	56
#tarianlogika	55
#banitogog	51
#kamibiangrusuh	46
#indonesia	45
#perketatprokespilkada	33
#demokrasi	33
#kpu	32
#menangkanpancasila	30
#pilkadalanjutprotokolke..	27
#partaitaatprokespilkada	27
#kenapapilkadadesember..	27
#jagakesehatan	25
#tunda	23
#sukseskanpilkadaamanc..	23
#sahabatbawaslu	23
#fraksipksdprri	23
#tundaatauturun	22
#pilkadaserentak2020	22
#pilkadaserentak	22
#kerjasamaatasipandemi	22
#corona	22
#berita	19
#8ukasindonews	17

- Berbagai tagar muncul dalam perbincangan twitter.
- Beberapa tagar menunjukan keresahan warganet maupun opini seperti: #pilkadaataupembunuhan, #diktatorkonstitusional, stoppilkadamaut, dan #pilkadabencanaserentak

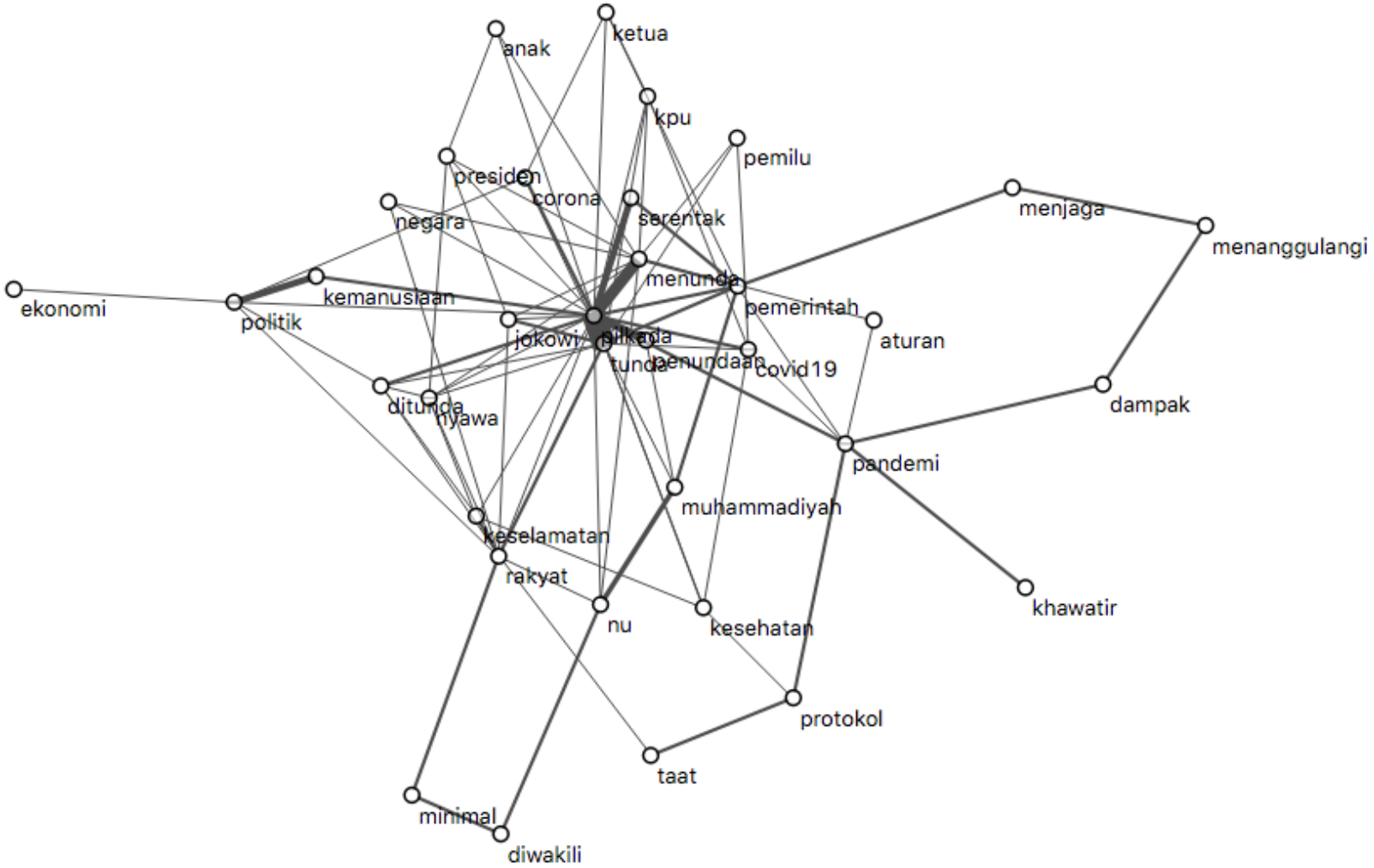

- Dalam Analisa jaringan kata tentang topik penundaan pilkada telihat berbagai aktor pemerintah maupun non pemerintah, serta keresahan warganet.
- Aktor: Presiden, NU, Muhammadiyah
- Keresahan: keselamatan rakyat, nyawa, kemanusiaan, dampak pandemi

Cuitan dengan Engagement Tertinggi

(Engagement = Likes + Replies + Retweets)

Text	Screen Name	Likes	Replies	Retweets	Day of Day Month Year	
Rakyat, minimal yg diwakili NU dan Muhammadiyah, telah meminta Pemerintah menunda Pilkada Serentak. Tapi tampaknya pemerintah masih yakin dengan kemampuannya menjaga dan menanggulangi dampak pandemi. Kita khawatir yg yakin hanya yg di Atas sana. Di bawah seperti dlm berita ini? https://t.co/pWxYhTgosF	gusmusgusmu	5,103	342	2,326	September 25, 2020	7,771
Komitmen ajak rakyat taat protokol pandemi utamanya bukan pd aturan, razia, hukuman, dll, melainkan keteladanan. Dgn menunda Pilkada, misalnya. Kemanusiaan di atas politik. Politik utk kemanusiaan. Begitu logikanya. Kalau politik saja tak mau ngalah, aplg ekonomi.	Husen_Jafar	4,882	67	2,216	September 20, 2020	7,165
Ketua @KPU_ID @mas_abudiman positif corona, TUNDA PILKADA!	podoradong	3,644	547	1,183	September 18, 2020	5,374
TUNDA PILKADA !	dr_tompi	3,403	426	1,158	September 21, 2020	4,987
Sikab KAMI : demi selamatkan nyawa manusia, tunda Pilkada 2020 https://t.co/7gO41bcbbq	msaid_didu	3,543	147	1,120	September 23, 2020	4,810
Seruan tunda Pilkada..- NU sudah..- Muhammadiyah sudah- PB IDI sudah- Nakes sudah- Elemen2 bangsa lain sudah..Kalian ini budek apa bebal sih @DPR_RI @KPU_ID @kemendagri @jokowi ?Telinga kalian buat dengarin siapa sebenarnya?	U_y_o_k	3,093	278	1,167	September 23, 2020	4,538
Jadi siapakah si dia itu?Dia sanggup stop majelis ta'lim,Dia sanggup halangi orang ke Masjid,Dia sanggup hentikan tabligh Akbar,Dia sanggup batasi pengajian, tapi gak sanggup tunda Pilkada...Wahai Corona, siapakah engkau sesungguhnya?	haikal_hassan	3,172	181	776	September 27, 2020	4,129
Jusuf Kalla menilai Pilkada 2020 lebih baik diundur hingga vaksin corona ditemukan. #kumparanNews https://t.co/r7xmANZ3jR	kumparan	2,960	134	957	September 19, 2020	4,051
Bangsat kalian @DPR_RI @KPU_ID Otak dan hati kalian dihargai berapa?Rakyat dipertaruhkan, kalian jual demi atasnama kekuasaanTunda pilkada njing!Dasar anjing-anjing kekuasaan@Golkar5 @PDI_Perjuangan @Gerindra @NasDem @PKSejahtera @PartaiDemokrat @DPP_PKB	podoradong	2,582	165	837	September 23, 2020	3,584
Said Aqil mengatakan usulan penundaan Pilkada 2020 semata-mata demi kemanusiaan. Ia menilai, agenda politik masih bisa ditunda, tapi keselamatan nyawa tidak bisa ditunda. #TempoNasional https://t.co/pajy0qXVfw	tempodotco	2,411	168	697	September 23, 2020	3,276

Contoh Cuitan Terkait Pemerintah, Ormas, dan/atau Rakyat

(Engagement = Likes + Replies + Retweets)

Text	Screen Name	Likes	Replies	Retweets	Day of Day Month Year	
rakyat, minimal yg diwakili nu dan muhammadiyah, telah meminta pemerintah menunda pilkada serentak. tapi tampaknya pemerintah masih yakin dengan kemampuannya menjaga dan menanggulangi dampak pandemi. kita khawatir yg yakin hanya yg di atas sana. di bawah seperti dlm berita ini? https://t.co/pwxyhtgosf	gusmusgusmu	5,103	342	2,326	September 25, 2020	7,771
komitmen ajak rakyat taat protokol pandemi utamanya bukan pd aturan, razia, hukuman, dll, melainkan keteladanan. dgn menunda pilkada, misalnya. kemanusiaan di atas politik. politik utk kemanusiaan. begitu logikanya. kalau politik saja tak mau ngalah, apig ekonomi.	Husen_Jafar	4,882	67	2,216	September 20, 2020	7,165
seruan tunda pilkada..- nu sudah..- muhammadiyah sudah- pb idi sudah- nakes sudah- elemen2 bangsa lain sudah..kalian ini budek apa bebal sih @dpr_ri @kpu_id @kemendagri @jokowi ?telinga kalian buat dengarin siapa sebenarnya?	U_y_o_k	3,093	278	1,167	September 23, 2020	4,538
bangsat kalian @dpr_ri @kpu_id otak dan hati kalian dihargai berapa?rakyat dipertaruhkan, kalian jual demi atasnama kekuasaantunda pilkada njing!dasar anjing-anjing kekuasaan@golkar5 @pdi_perjuangan @gerindra @nasdem @pksejahtera @partaidemokrat @dpp_pkb	podoradong	2,582	165	837	September 23, 2020	3,584
mengharukan. daya lindung ibu terhadap anaknya selalu sama saja dengan daya lindung penguasa mana pun, termasuk di sini, terhadap rakyatnya.. misalnya dgn menunda pemilu.. seperti dilakukan bu jacinda ardern, pm selandia baru [redacted] @bharuka_nitin https://t.co/yespka7ddo	sudjiwotedjo	1,812	46	864	September 23, 2020	2,722
sebuah keputusan yg tidak patut ditiru. mendahulukan keselamatan rakyat di atas hak politik dan konstitusinya adalah kebodohan.virus corona: infeksi melonjak lagi, selandia baru tunda pemilu - bbc news indonesia https://t.co/cn7gnolkfv	Azzamizzulhaq	2,021	45	609	September 22, 2020	2,675
dpd minta pemerintah tunda pilkada. ketua mpr minta pemerintah tunda pilkada. komnas ham minta tunda pilkada. anggota dpr minta pemerintah tunda pilkada. tapi pemerintah dan penyelenggara blm bersikap. padahal klaster terbaru adlh klaster pilkada. apa ada anak dan mantu presiden?	ChristWamea	1,921	80	560	September 12, 2020	2,561
saya tetap meminta penundaan pilkada. tapi sebenarnya dengan sakitnya beberapa anggota kpu itu sudah jadi kode bahwa sebaiknya pilkada ditunda.semoga kode tersebut bisa dipahami. untuk kebaikan rakyat dan negara kita sendiri.	dr_koko28	1,804	87	441	September 19, 2020	2,332
tidak akan ada konser musik, jalan santai ataupun acara lain kalau pilkadanya ditundajadi harusnyatunda pilkada! bukan alasan tiada kan acara tapi pilkadanya tetap jalanitu sama saja menggarami lautanselamatkan rakyat dengan tunda pilkada!#bangsatbangsa	podoradong	1,785	25	515	September 17, 2020	2,325
desakan nu dan muhammadiyah tunda pilkada ditolak, habib rizieq: bukti nyata kegilaan rezim jokowihttps://t.co/r5nukznqos	geloraco	1,335	14	467	September 22, 2020	1,816

LABORATORIUM BIGDATA ANALYTICS · DPP Departemen Politik & Pemerintahan Fisipol UGM · PolGov RESEARCH CENTRE FOR POLITICS AND GOVERNMENT Department of Politics & Government - FISIPOL UGM

Text Network pada Puncak Percakapan (21 September 2020)

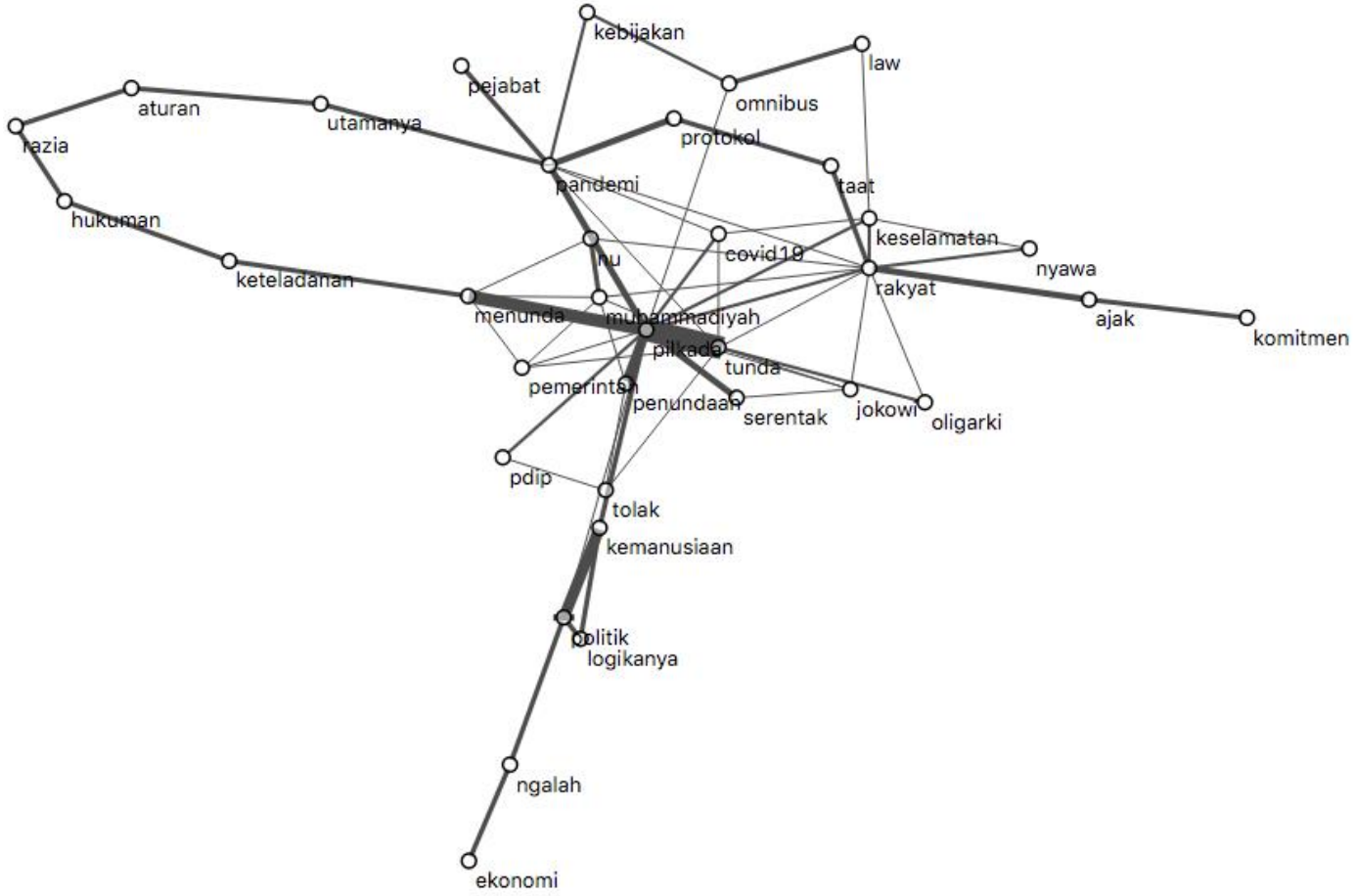

- Dalam puncak perbincangan twitter pada 21 September, juga terlihat berbagai aktor dan keresahan warganet seperti yang terlihat sebelumnya.
- Namun, terlihat juga isu-isu lain yang oleh warganet dikaitkan dengan topik pilkada yakni: ommibus law dan oligarki.
- Di puncak 21 September 2020, warganet paling banyak me-*retwit* @Husen_Jafar yang beropini tentang kemanusian di atas politik.

September 20, 2020	Husen_Jafar	komitmen ajak rakyat taat protokol pandemi utamanya bukan pd aturan, razia, hukuman, dll, melainkan keteladanan. dgn menunda pilkada, misalnya. kemanusiaan di atas politik. politik utk kemanusiaan. begitu logikanya. kalau politik saja tak mau ngalah, aplg ekonomi.	7.165

Cuitan di Titik Puncak (21/09) dengan Engagement Tertinggi

(Engagement = Likes + Replies + Retweets)

Text	Screen Name	Likes	Replies	Retweets	Day of Day Month Year	
TUNDA PILKADA !	dr_tompi	3,403	426	1,158	September 21, 2020	4,987
Saran terakhir untuk oligarki:1. Tunda Pilkada, fokus ke pandemi. Pejabat hanya menjalankan pelayanan publik rutin dan penanganan pandemi. Tidak membuat kebijakan strategis.2. Tarik pasukan non-organik dari Papua. Bentuk komite dialog.3. Hentikan pembahasan Omnibus Law.	Dandhy_Laksono	2,133	38	791	September 21, 2020	2,962
PERNYATAAN PERS PP MUHAMMADIYAHRekomendasi untuk penundaan Pilkada dan menolak Omnibus Law untuk keselamatan nyawa rakyat!#AtasiVirusCabutOmnibus #JegalSampaiGagal #gagalkanomnibuslaw https://t.co/efF8gZp1mR	kaderhijaumu	1,059	14	586	September 21, 2020	1,659
perlu gak gua cium kaki @jokowi untuk TUNDA PILKADA?Demi keselamatan warga dari wabah pandemic covid19	ghanieierfan	1,160	226	233	September 21, 2020	1,619
Ganjar Pranowo Makin Khawatir Covid-19, Meminta Pusat Tunda Pilkadahttps://t.co/inbPQTiEiz	idtodayco	842	123	344	September 21, 2020	1,309
Kalok @jokowi mengabaikan usulan NU dan Muhammadiyah untuk menunda Pilkada, berarti jangan berharap suara rakyat jelata pernah didengar. Palingan suara jelata hanya dianggap suara coro!	rahung	789	28	239	September 21, 2020	1,056
Tito tunda Pilkades tapi tidak PilkadaPDIP tolak tunda PilkadaIstana via Fadjroel bilang Pilkada sesuai jadwal demi "menjaga hak d i n a s t i d a n o l i g a r k i konstitusi rakyat"https://t.co/aroTa2lrSZ	fahrisalam	559	16	388	September 21, 2020	963
Menunda Pilkada adalah pilihan terbaik bagi keselamatan bersama. Jgn sampai kontradiksi kata n perbuatan. Maunya prioritaskan kesehatan eh ngotot lakukan Pilkada. Memang pelajaran "logika" sdh lama tak diajarkan. Mungkin bisa masuk kurikulum Mas Menteri. https://t.co/96sqzhDAK7	fadlizon	639	50	141	September 21, 2020	830
Haris Rusly: Jokowi Membahayakan Rakyat, NU Dan Muhammadiyah Usul Tunda Pilkada Tapi Dilepehin Istanahttps://t.co/TZcSEyGVye	idtodayco	565	27	170	September 21, 2020	762
Saya setuju dengan Pak JK. Beginilah sikap negarawan. Keselamatan rakyat adalah yang utama. Tunda pilkada, atasi pandemi dulu!Pilihan Menyelamatkan Rakyathttps://t.co/UWkUemB3cw	BiLLYKHAERUDIN	492	9	257	September 21, 2020	758

LABORATORIUM BIGDATA ANALYTICS

DPP Departemen Politik & Pemerintahan Fisipol UGM

PolGov RESEARCH CENTRE FOR POLITICS AND GOVERNMENT Department of Politics & Government - FISIPOL UGM

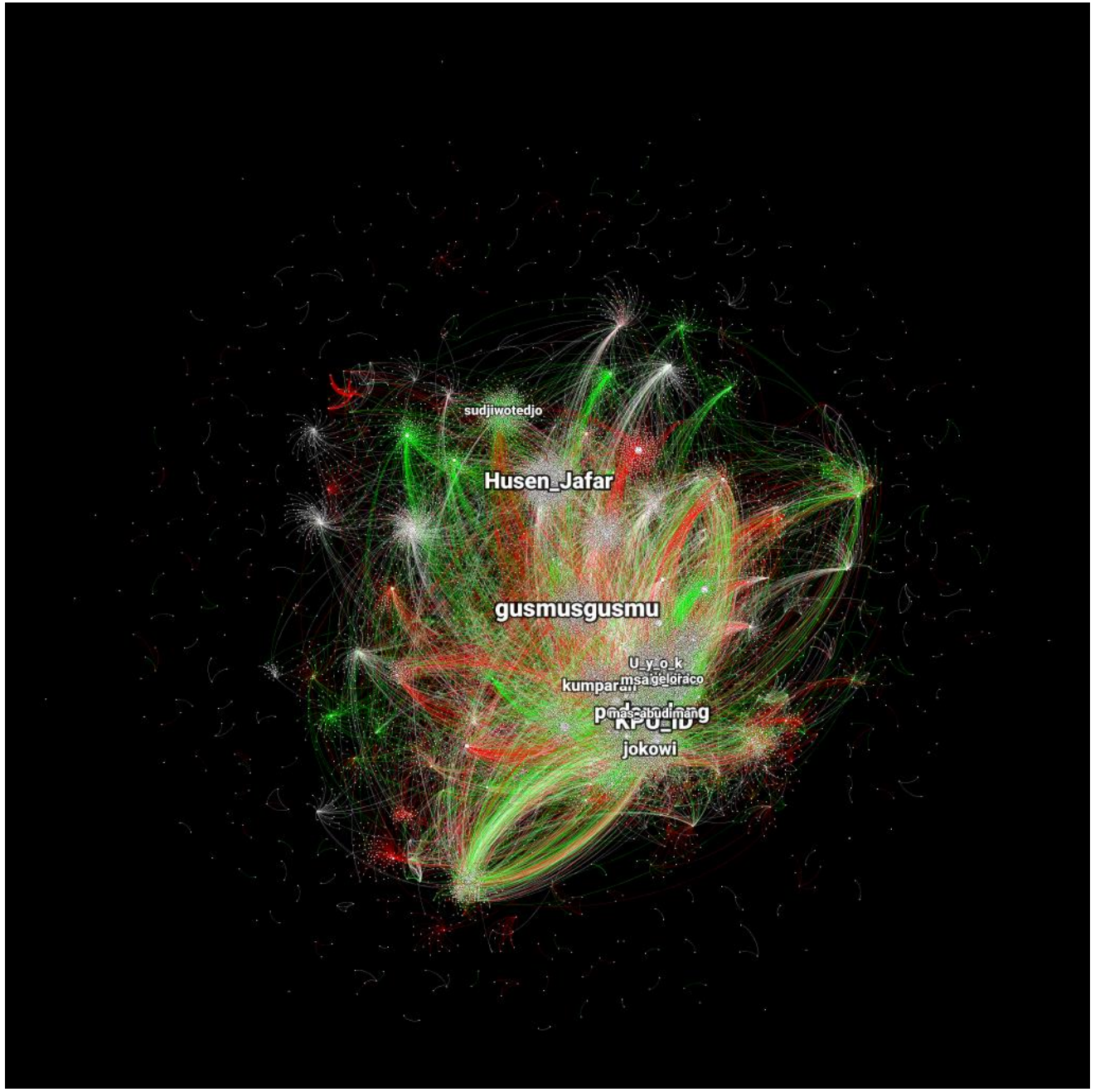

Social Network Analysis (SNA) Mention

Interaksi Antar Akun Terkait Isu Penundaan Pilkada

- Terlihat melalui SNA bahwa kluster yang terbentuk cenderung tidak memiliki pola umum. Hal ini mengindikasikan bahwa perbincangan ttg penundaan pilkada belum bisa disimpulkan apakah tersebar (interaksi) atau terkonsentrasi
- Terdapat beberapa jenis akun yg sering di-mention, yaitu akun personal, akun media, dan akun aktor pemerintah
- Posisi antar titik menunjukan dekat/jauhnya rute interaksi. Nama-nama yang muncul berdekatan kerap disebut/di-*mention* secara bersamaan. Begitu juga sebaliknya.

LABORATORIUM BIGDATA ANALYTICS · DPP Departemen Politik & Pemerintahan Fisipol UGM · PolGov RESEARCH CENTRE FOR POLITICS AND GOVERNMENT Department of Politics & Government - FISIPOL UGM

Kesimpulan (1)

- Indonesia bukan satu-satunya negara yang menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain dan memanfaatkan pengalaman sendiri.
- Dalam rentang waktu tujuh bulan pengambilan data, tercatat ada sebanyak 3.746 artikel dari 155 potal media dan 52.734 twit yang memperbincangkan topik penundaan Pilkada 2020. Hal ini menunjukkan bahwa topik penundaan pilkada mendapatkan *media coverage* yang cukup besar, baik di media online maupun di media sosial Twitter.
- Terdapat dua puncak dalam pemberitaan di media online tentang penundaan pilkada 2020, yakni pada 31 Maret 2020 (paska kesepakatan penundaan Pilkada 2020) dan 21 September 2020 (paska Muhammadiyah dan NU memberikan pernyataan resmi untuk tidak melaksanakan pilkada di masa pandemi). Sedangkan, puncak perbincangan di media sosial twitter terjadi pada 21 September 2020.
- Hal ini menunjukan bahwa masyarakat belum yakin sepenuhnya dengan rancangan pemerintah dalam menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi. Dalam hal ini kesiapan penyelenggara pemilu.
- Muhammadiyah dan NU menjadi dua (2) institusi non negara yang memiliki pengaruh signifikan dalam pemberitaan media tentang penundaan pilkada, serta mendapatkan respon publik yang besar di media sosial, sekaligus ini menunjukan partisipasi masyarakat di tengah pandemi.

Kesimpulan (2)

- Pemberitaan tentang penundaan pilkada paling banyak dikaitkan dengan isu kesehatan yang kemudian disusul isu hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini munjukan bahwa isu kesehatan merupakan isu yang paling banyak mendapat perhatian terkait pilkada di tengah pandemi. Sedangkan pada sisi yang lain, pertimbangan yang digunakan pemerintah adalah aspek Kesehatan (ketidakpastian situasi) dan stabilitas politik dalam negeri. Di beberapa kesempatan, pemerintah menyampaikan pertimbangan ekonomi.
- Setidaknya ada enam aktor yang sering diberitakan dalam topik penundaan pilkada yakni Joko Widodo (Pemerintah), Arief Budiman (KPU), Tito Karnavian (Pemerintah), Mahfud MD (Pemerintah), NU, dan Muhammadiyah. Aktor pemerintah cenderung mendorong pelaksanaan Pilkada 2020, KPU cenderung mengikuti keputusan pemerintah, dan NU-Muhammadiyah tidak mendukung pelaksanaan Pilkada 2020.
- Keresahan warganet di media sosial twitter atas Pilkada 2020 berpusat pada keselamatan rakyat, nyawa, kemanusiaan, dan dampak dari pandemi. Di puncak perbincangan, terlihat isu lain yang dikaitkan dengan topik penundaan pilkada 2020 yakni omnibus law dan oligarki.
- Dari SNA, terlihat bahwa topik penundaan pilkada terdapat sejumlah aktor dominan yang tersebar cukup merata.

LABORATORIUM BIGDATA ANALYTICS

DPP
Departemen Politik & Pemerintahan Fisipol UGM

PolGov
RESEARCH CENTRE FOR POLITICS AND GOVERNMENT
Department of Politics & Government - FISIPOL UGM